

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP *CORPORATE*
*ENVIRONMENTAL DISCLOSURE***
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di
BEI Tahun 2009-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Taufik Puspita Sanjaya
NIM. C2C009136

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Taufik Puspita Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009136
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)**
Dosen Pembimbing : Drs. Daljono, M.Si., Akt.

Semarang, 22 Mei 2013

Dosen Pembimbing,



(Drs. Daljono, M.Si., Akt.)

NIP. 19640911993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Taufik Puspita Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009136
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 Juni 2013

Tim Penguji

1. Drs. Daljono, M.Si., Akt.

(.....)

2. Siti Mutmainah, SE, M.Si, Akt.

(.....)

3. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Taufik Puspita Sanjaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

(Taufik Puspita Sanjaya)

NIM : C2C009136

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika engkau mempersulit orang lain, suatu saat kesulitan yang sama akan mendatangimu, dan ketika engkau mempermudah orang lain maka kemudahan akan senantiasa menyertaimu”

*“Only the individual can think, and thereby create new values for society, nay, even set up new moral standards to which the life of the community conforms. ... The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been **Kindness, Beauty and Truth.**” (Albert Einstein, 1954)*

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku (Margono AR dan Sulistyorini), kakak dan adikku (Sarah Rini dan Farah Dila), teman-teman, dan untuk Anindya Nugrahesty. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan, semoga skripsi ini dapat membanggakan kalian.

ABSTRACT

This research aimed to investigate the influence of Good Corporate Governance (GCG) elements on Environmental Disclosure on Indonesia's mining companies. The Good Corporate Governance (GCG) elements that was applied in this research are proportion of independence board, institutional ownership, board size, and proportion of female director. Control variables used are ROA, market capital, sales.

This study is undertaken using documentary method and using data from annual reports from mining companies listed in Indonesian Banking Directory 2009-2011. A total of 60 mining companies used as a sample. The method of analysis of this research used multiple regression.

The results of this research indicate that the variables that affect Environmental Disclosure of Indonesia's mining companies are proportion of independence board, institutional ownership, board size and ROA.

Keywords : *Good Corporate Governance, Environmental Disclosure, CSR*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan tambang di Indonesia. Elemen *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah proporsi Dewan Komisaris Independen (Independensi Dewan Komisaris), *Institutional Ownership*, ukuran Dewan Komisaris, dan proporsi wanita dalam Dewan Komisaris. Variabel kontrol yang digunakan adalah ROA, *market capital*, *sales*.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi menggunakan data laporan tahunan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Sebanyak 60 perusahaan digunakan sebagai sampel. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi *Environmental disclosure* perusahaan pertambangan di Indonesia adalah proporsi Dewan Komisaris Independen (Independensi Dewan Komisaris), *Institutional Ownership*, ukuran Dewan Komisaris dan ROA perusahaan.

Kata kunci : *Good Corporate Governance, Environmental Disclosure, CSR*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan, bantuan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan dedikasi kepada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Daljono, MSi, Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. Sudarno, Msi, Akt, Ph.D selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.
6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kakak dan adikku tercinta Sarah Rinie Puspita Sarie dan Farah Dila Puspita Sari yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik untuk membahagiakan kedua orangtua kita.
8. Anindya Nugrahesty yang selalu menemani, mendoakan dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2008 dan 2009 yang selalu memberikan warna selama menjalani perkuliahan (Dika, Brian, Tirta, Randy, Mayco, Dila, Arin, Dewi, Nora, Fitri, Lovink, Putu, Ema, Ivan, Mahe, Alvin dll.). Wujudkan mimpi kita!
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semarang, 20 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Legitimasi	15
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	17
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
2.1.4 <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	23
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.1.5.1 Komisaris Independen	27
2.1.5.2 <i>Institutional Ownership</i>	30
2.1.5.3 Ukuran Dewan Komisaris	30
2.1.5.4 Proporsi Wanita dalam Dewan	32
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	36

2.4.2 Pengaruh <i>Institutional Ownership</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	38
2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	39
2.4.4 Pengaruh Proporsi Wanita dalam Dewan Komisa Terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)	44
3.1.2 Variabel Bebas (Independen)	45
3.1.2.1 Proporsi Komisaris Independen	46
3.1.2.2 <i>Institutional Ownership</i>	46
3.1.2.3 Ukuran dewan Komisaris.....	46
3.1.2.4 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris	46
3.1.3 Variabel Kontrol	47
3.1.3.1 Profitabilitas	47
3.1.3.2 <i>Firm Size</i>	47
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis	49
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.5.2.1 Uji Normalitas	49
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	50
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	51
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	52
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R ²)	53
3.5.3.2 Uji F	53
3.5.3.3 Uji Parsial (t test).....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.2 Analisis Data	56
4.2.1 Statistik Deskriptif	56

4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.2.1 Uji Normalitas	61
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	64
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	65
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	66
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	67
4.2.3.1 Uji F	67
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.2.3.3 Uji t.....	68
4.3 Intepretasi Hasil.....	72
4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Lingkungan	72
4.3.2 Pengaruh <i>Institutional Ownership</i> terhadap Pengungkapan Lingkungan	74
4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan	75
4.3.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Wanita terhadap Pengungkapan Lingkungan.....	76
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Keterbatasan	79
5.3 Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.1	Daftar Hasil Pemilihan Sampel.....	55
Tabel 4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	56
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi.....	57
Tabel 4.4	Data Pengungkapan Lingkungan	59
Tabel 4.5	Identifikasi <i>Outlier</i> Variabel	61
Tabel 4.6	Pengeluaran <i>Outlier</i> Variabel.....	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.11	Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.12	Hasil Uji R^2	68
Tabel 4.13	Hasil Uji t.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Daerah <i>Legitimacy Gap</i>	17
Gamabr 2.2	Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	86
Lampiran B Indikator Kinerja Lingkungan	87
Lampiran C Hasil Output SPSS.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan keputusan investasi, para investor (*stakeholders*) mempertimbangkan kinerja sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena di era modern perusahaan tidak hanya mencari laba atau *profit* yang sebanyak-banyaknya bagi perusahaan, namun juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial maupun lingkungan yang dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan perusahaan. Menurut Pflieger, *et al* (dalam Ja'far dan Arifah, 2006) sebagian perusahaan dalam industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan disamping usahanya untuk mencari laba. Perusahaan juga mendapat tekanan untuk dapat memberikan informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan yang mereka lakukan dari masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perusahaan mendapat tekanan dari *stakeholder* untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) yang dicantumkan dalam pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) merupakan bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*). Laporan tersebut dapat disertakan dalam laporan keuangan berupa laporan yang berdiri sendiri (*sustainability reporting*). Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan atas kegiatan operasi

yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam *sustainability reporting* dijelaskan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja perusahaan dan produk yang dihasilkan di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pengungkapan *sustainability reporting* ini menggunakan standar pedoman GRI (*Global Reporting Initiative*) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990.

Pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) didefinisikan sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan implikasi lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Deegan, 2006). Dalam pemahaman lain, istilah *environmental accounting* didefinisikan sebagai penyedia informasi pengelolaan lingkungan untuk membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan *overhead* dan pelaporan informasi lingkungan kepada publik (Yakhou dan Vernon, 2004). *Environmental accounting* dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *environmental accounting disclosure* seperti yang dikemukakan oleh Lindrianasari (2007). Istilah lain juga muncul seperti *Social and Environmental Reporting* atau juga sering dikenal dengan *Triple Bottom Line Report* yang dalam pelaporannya keuangannya, perusahaan melaporkan kinerja aktivitas operasional perusahaan, kinerja lingkungan, dan kinerja sosialnya (Markus dan Ralph, 1999). Berdasarkan konsep tersebut, perusahaan yang ingin *sustain* harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Anggraini, 2007). Jadi suatu perusahaan tidak hanya ingin memperoleh keuntungan (*profit*), akan tetapi juga memberikan perhatian dan turut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan

menjaga kelestarian dari lingkungan khususnya pada lingkungan perusahaan (*planet*). Dari semua definisi mengenai aktivitas tersebut, secara umum, pengungkapan sosial dapat didefinisikan sebagai pelaporan lingkungan, etika dan kegiatan manusia (Adams *et al*, 1998;. Branco & Rodrigues, 2007; Gray *et al*, 1995;.Hackston & Milne, 1996).

Brown dan Deegan (1998) mengemukakan *environmental disclosure* penting untuk dilakukan, karena melalui *environmental disclosure* pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan pendapat Brown dan Deegan (1998) *environmental disclosure* dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan dukungan dan masalah permodalan dari *stakeholders* maupun investor. Manfaat lain dari *environmental disclosure* antara lain untuk menaksir dampak atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan operasi perusahaan dan mengurangi dampak dari kegiatan dari perusahaan tersebut terhadap lingkungan di sekitar perusahaan sehingga citra dari perusahaan dan legitimasi eksternal dapat ditingkatkan. Hal ini didukung oleh pendapat Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) yang menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan CSR, karena akan memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan dimata investor dan analis keuangan. Menurut

O'Donovan (2002), beberapa manfaat yang diperoleh dari praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu (i) menyelaraskan nilai perusahaan dengan nilai sosial, (ii) menghindari tekanan dari kelompok tertentu, (iii) meningkatkan image dan reputasi perusahaan, dan (iv) menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kesadaran akan pentingnya *environmental reporting* semakin berkembang di masyarakat. Kesadaran tentang produk yang ramah lingkungan juga menjadi tren dalam masyarakat global. Hal inilah yang mencerminkan adanya kepedulian dari masyarakat luas terhadap kelestarian lingkungan. Dunlap dan Scarce (1991) menyatakan bahwa dari hasil *polling*, publik memandang kegiatan bisnis dan perusahaan sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Kasus di Indonesia seperti pada PT. Freeport Indonesia di Papua (kompas.com, 19 September 2011) dapat dijadikan contoh dampak dari pengelolaan perusahaan tambang yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, publik ingin mengetahui sebesar apa dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kinerja lingkungan kepada publik. Terdapat beberapa media yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan laporan lingkungan, seperti laporan tahunan (*annual reports*), laporan lingkungan tersendiri (*stand alone environmental reports*) dan *website*.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena semakin pentingnya pelaporan mengenai kegiatan sosial lingkungan perusahaan dan peristiwa yang menimpa perusahaan di Indonesia, mendorong Pemerintah untuk menetapkan regulasi yang mengatur *environmental reporting* yang terdapat di dalam CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.

Undang-undang memang telah diatur oleh pemerintah, namun demikian penetapan undang-undang tersebut tidak membuat pelaporan lingkungan bebas dari kelemahan/keterbatasan. Lindrianasari (2007) menegaskan bahwa salah satu faktor keterbatasan itu adalah lemahnya sanksi hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus tentang lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan meskipun telah terdapat perundang-undangan yang mengatur. Melihat hal

tersebut, suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diharapkan dapat menutup celah hukum yang ada di Indonesia.

Teori yang akan digunakan sebagai dasar teori pada penelitian ini adalah teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Dalam proses pengungkapan kegiatan sosial dan lingkungan suatu organisasi atau perusahaan mendapat tekanan dari pihak eksternal termasuk pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengungkapan dan memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan mengapa perusahaan mengungkapkan pelaporan lingkungan. Hal ini secara tidak langsung membuat suatu “ikatan” antara perusahaan dengan pihak eksternal sehingga terjadi kontrak sosial karena dengan pengungkapan tersebut maka citra perusahaan akan baik dan dengan penilaian atau citra baik dari masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan pun dapat terus dipertahankan sehingga suatu perusahaan dapat tetap ada dan berkelanjutan (*going concern*).

Environmental reporting perlu menggunakan sistem akuntansi lingkungan yang dirancang secara sistemik, terstruktur, dan metodik agar perusahaan dapat melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, pembebanan biaya lingkungan pada tiap produk yang dihasilkan dapat dihitung secara tepat sehingga perhitungan harga pokok produksi produk tersebut dapat dihitung secara lebih tepat, realistis dan tentunya manusiawi, walaupun pada kenyataannya pengungkapan dalam *annual report* masih berbentuk laporan kualitatif.

Pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan tata kelola yang baik dari perusahaan (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Forum Corporate Governance Indonesia, 2002). Dalam pemahaman yang lain *corporate governance* diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* (KNKG, 2006).

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* tahun 2006, di Indonesia terdapat 5 asas yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kelima asas tersebut memiliki peran yang sentral, karena apabila *corporate governance* menerapkan asas-asas tersebut maka diharapkan kualitas pengungkapan laporan keuangan akan semakin baik karena hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa kinerja perusahaan. Dengan demikian, esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

Seperti studi yang telah dilakukan oleh Adams dan Zutshi (2004) yang merekomendasikan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan dan keprihatinan dari kelompok pemangku kepentingan utama ini dibahas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* juga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

Agar tercipta akuntabilitas dalam suatu perusahaan, ukuran dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Hannifa dan Cooke dalam Michelin dan Parbonetti, 2010). Ukuran dewan komisaris dapat memainkan peran yang penting dalam memantau kinerja dalam suatu perusahaan. Dalam beberapa studi, ditemukan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar dapat berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun demikian, terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa ukuran suatu dewan yang terlalu besar menjadi kurang efektif (Kassins dan Vafeas, 2002). Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa ukuran dewan yang terlalu besar dapat menghambat dalam mencapai suatu keputusan dibanding dengan ukuran dewan yang berukuran relatif kecil.

Komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance* yang dapat dikaitkan dengan pengungkapan lingkungan. Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para stakeholder lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*). Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Said, *et al* (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan *image* perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya, karena hal tersebut dapat meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat. Selain itu beberapa studi tentang pengungkapan sukarela menemukan hubungan positif antara komisaris independen dan pengungkapan sukarela (Cheng dan Courtenay, 2006; Shan, 2009; Donnelly dan Mulcahy, 2008).

Konsentrasi dalam kepemilikan merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009 dalam Kathyayiniet *al*, 2012). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi

sosial dalam laporan tahunannya sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholders*, sehingga legitimasi dan nilai perusahaan dalam mekanisme pasar modal yang ditunjukkan melalui harga saham perusahaan dapat diperoleh.

Tingkat kemajemukan dalam suatu dewan memberikan pengaruh dalam keputusan maupun kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Bonn (2004) menemukan bahwa adanya wanita dalam anggota dewan maka dapat memberikan efek yang positif pada kinerja perusahaan di Australia. Adams dan Ferreira (2004) juga menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam dewan meningkatkan proses pengambilan keputusan, efektivitas dewan dan wanita memiliki kehadiran dan partisipasi yang lebih baik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, Kathy., Carol A. Tilt, Laurence H. Lester, (2012). Fokus penelitian adalah untuk menguji pengaruh variabel *corporate governance* yang meliputi komisaris independen (*board independence*), kepemilikan institusi (*institutional ownership*), ukuran dewan direksi (*board size*) dan proporsi wanita dalam dewan (*proportion of female directors*) dengan sampel 100 perusahaan yang listing pada *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2008.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, *et al.* (2012). Variabel ukuran dewan direksi (*board size*) dimodifikasi menjadi variabel ukuran dewan komisaris dikarenakan kondisi di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system* yang memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisaris). Selain itu

pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai sampel karena pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnis usahanya. Penggunaan sumber daya alam tersebut menimbulkan konsekuensi kerusakan alam yang ditimbulkan dalam proses pengelolaannya. Dengan demikian, pengambilan sampel tersebut dapat terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang *environmental disclosure*.

Topik mengenai *corporate governance* di Indonesia telah banyak diteliti, namun demikian yang menghubungkan karakteristik *corporate governance* proporsi perempuan dalam dewan direksi dengan pengungkapan lingkungan masih sangat terbatas. Selain itu adanya *research gap* pada penelitian-penelitian mengenai variabel-variabel karakteristik *corporate governance*. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan diuji pengaruh komisaris independen, *institutional ownership*, ukuran dewan komisaris dan proporsi wanita dalam dewan komisaris sebagai proksi dari karakteristik *corporate governance* terhadap praktek pengungkapan lingkungan (*corporate environmental disclosure*).

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan prinsip atau asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *environmental reporting* yang cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan praktik CSR. Hal ini dikarenakan adanya salah satu prinsip dari GCG yaitu *responsibilitas/responsibility* yang

ditekankan pada kepentingan dari *stakeholder* perusahaan. Dengan prinsip tersebut melahirkan dorongan pada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial maupun lingkungan tidak hanya bagi pemegang saham dan kreditur saja melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungannya.

Peran dari pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) di dalam CSR ini sangat penting mengingat suatu perusahaan hidup dan berdiri di lingkungan masyarakat dan dari aktivitasnya kemungkinan dapat memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar yang mungkin juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat global. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial yang khususnya berhubungan dengan lingkungan menjadi alat perusahaan atau manajerial di dalam perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
2. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris (*board size*) berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
4. Apakah proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari elemen-elemen *corporate governance* yang terdiri dari proporsi komisaris independen, *institutional ownership*, ukuran dewan komisaris dan proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan (*environmental reporting*).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi para pelaku bisnis, dapat memahami peranan dari praktik dan implementasi GCG yang diterapkan perusahaan dalam kegiatan *corporate environmental disclosure*.
2. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak akademik ataupun non-akademik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan teori-teori yang menjadi dasar acuan untuk menganalisis dalam penelitian. Bagian ini terdiri

dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, dan pengembangan hipotesis. Bab III adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atau interpretasi hasil penelitian. Bab yang terakhir adalah bab V yang menjelaskan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan sebagai salah satu landasan dilakukannya penelitian ini, karena konsep teori legitimasi perusahaan sebagai suatu entitas memiliki semacam ikatan “kontrak” dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan menurut Ghazali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan terpenuhinya kontrak tersebut maka suatu perusahaan dapat melegitimasi suatu perusahaan atau organisasi dan juga aktivitasnya. Dengan kata lain, jika kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan atau organisasi bergantung pada penilaian masyarakat luas akan organisasi tersebut.

Teori legitimasi menyebutkan bahwa suatu organisasi akan terus mengikuti perkembangan norma yang muncul di dalam masyarakat. Karena perubahan waktu, norma yang terdapat di dalam masyarakat juga sering mengalami perubahan dan perusahaan diharapkan selalu mengikuti perkembangannya.

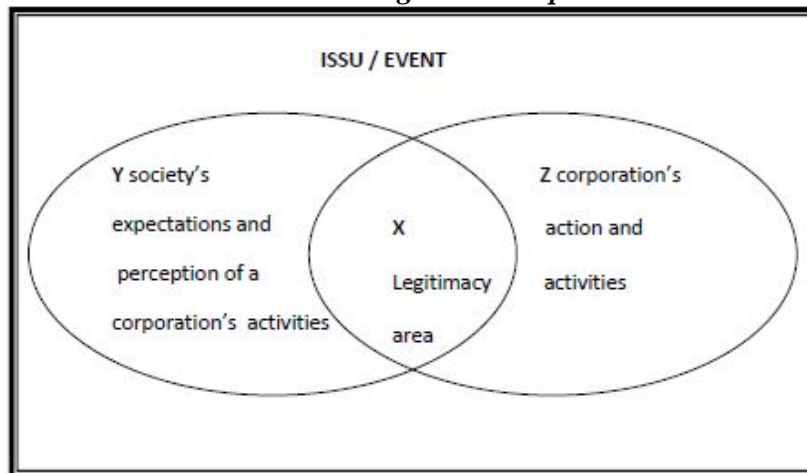
Dowling dan Preffer (dalam Chariri dan Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi ini bermanfaat dalam menganalisis perilaku dalam organisasi. Mereka mengatakan (p.131):

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Peran penting dari manajer perusahaan adalah untuk membuat pandangan yang baik dari masyarakat dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat menilai bahwa suatu perusahaan atau organisasi tidak melanggar “kontrak” tersebut. Suatu pengungkapan menjadi cara yang tepat untuk membuat pandangan atau image yang baik dari masyarakat. Namun demikian, dalam interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, dapat terjadi perbedaan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang dinamakan dengan “*legitimacy gap*”. Menurut Warticl dan Mahon (dalam Chariri dan Ghozali, 2007), *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan:

1. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Gambar 2.1
Daerah *Legitimasi Gap*



Sumber: O' Donovan (2002)

Adanya *legitimacy gap*, dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Dowling dan Pfeffer (dalam Deegan, 2002) menjelaskan bahwa ketika organisasi bertemu dengan ancaman legitimasi, maka organisasi dapat melegitimasi aktivitas-aktivitasnya dengan jalan:

1. Organisasi dapat menyesuaikan *output*, tujuan dan metode-metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku.

2. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga hal tersebut sesuai dengan praktik-praktik, output, dan nilai-nilai organisasi saat ini.
3. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi untuk dikenali lewat simbol-simbol, nilai-nilai atau institusi yang memiliki dasar legitimasi kuat.

2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemilik (*shareholder*) melainkan juga kepada *stakeholder*. *Stakeholder* sering dikaitkan dengan investor dan kreditor, akan tetapi *stakeholder* mempunyai kaitan yang lebih luas seperti kepada pemerintah, masyarakat, konsumen, dan lain-lain. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), *stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Kouhy dan Adams (1994, p.53 dalam Ghozali dan Chariri, 2007) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Walaupun *stakeholder* seperti masyarakat tidak memiliki suatu kepentingan secara langsung kepada perusahaan tersebut akan tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan, seperti pengambilan keputusan dan lain-lain. Deegan (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) mengatakan *stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power* *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Lebih lanjut Ullmann (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Ullman (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk memmanage *stakeholder*-nya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Hal ini sesuai dengan model *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Freeman (dalam Anyta 2011), yaitu model perencanaan dan kebijakan bisnis. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepercayaan dari *stakeholdernya* manajemen perusahaan melakukan berbagai macam kegiatan

termasuk melalui pengungkapan-pengungkapan yang berkaitan dengan aktivitas mereka.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer perusahaan mengerti akan lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di dalam lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* ini adalah untuk menolong manajer perusahaan dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

2.1.3 Corporate Social Responsibility

Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholder*, terutama masyarakat disekitar wilayah aktivitas operasi perusahaan tersebut. CSR memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam aktivitas operasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Darwin (dalam Anggraini, 2006) Pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkonsentrasi dalam *profit*, akan tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan Gray, *et al* (dalam Waryanto, 2010). Dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan diharapkan perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata melainkan perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Di Indonesia, dalam kebijakan pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dalam Bab V Pasal 74, yang dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Diuraikan pulabahnya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.

Lebih lanjut, Hackston dan Milne (1996, dalam Sembiring, 2005) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pengungkapan lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut pada laporan tahunan perusahaan atau mengungkapkannya ke dalam laporan yang terpisah (*sustainability report*). Mengungkapkan laporan CSR ke dalam Laporan tahunan mungkin lebih biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut Witoelar (2005) ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, antara lain:

1. Meningkatkan Citra Perusahaan,
2. Disukai Konsumen,
3. Diminati oleh Investor,
4. Dipahami oleh Stakeholder.

Hal-hal yang menjadi alasan untuk mendorong atau memotivasi manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan menurut Deegan (2002) antara lain:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dan manajer tidak peduli dengan *cost* yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Lembaga pemberi pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka, cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya.
5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap “kontrak sosial” tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk *manage* kelompok *stakeholder* tertentu yang *powerful*.
8. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, *ethical investment funds* merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkatkan perannya.
9. Untuk mematuhi persyaratan industri (*code of conduct*) tertentu.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.1.4 Corporate Environmental Disclosure

Corporate environmental disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholder* berupa laporan aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Bethelot (dalam Al Tuwaijri, 2004) mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai kumpulan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif, bentuk laporan keuangan atau catatan kaki. Bidang *environmental disclosure* meliputi pengeluaran atau biaya operasi untuk fasilitas dari peralatan pengontrol polusi di masa lalu dan sekarang.

Menurut Pflieger, *et al* (dalam Ja'far dan Arifah, 2006) sebagian perusahaan dalam industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan disamping usahanya untuk mencari laba. Ferreira (dalam Ja'far dan Arifah, 2006) juga mengungkapkan bahwa persoalan konservasi lingkungan merupakan tugas dari setiap individu, perusahaan dan pemerintah. Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya di dalam *annual report*. Hal ini karena terkait dengan tiga aspek persoalan kepentingan yaitu keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). GRI adalah sebuah organisasi nirlaba yang memelopori kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial berkelanjutan. Dalam penelitian ini digunakan standar GRI untuk mengukur *corporate*

environmental disclosure (CED).GRI menyediakan untuk semua perusahaan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang digunakan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI menggunakan 6 indikator pengungkapan, yaitu:

1. Ekonomi

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya.

2. Lingkungan hidup

Tema ini berisi 30 (tiga puluh) item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. Ketenagakerjaan

Tema ini berisi 14 (empat belas) item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi perekrutan, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

4. Hak asasi manusia

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang mencakup berapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.

5. **Kemasyarakatan**

Tema ini berisi 8 (delapan) item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. **Tanggung jawab atas produk**

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

2.1.5 Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai pedoman yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh perusahaan untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Lebih lanjut, KNKG (2006) menyatakan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah “untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku

kepentingan lainnya”. Untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah *going concern*, suatu perusahaan diharapkan memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Adapun asas-asas *good corporate governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG 2006) prinsip-prinsip *good corporate governance* terdiri dari:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Adapun elemen-elemen mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan proporsi wanita dalam dewan komisaris.

2.1.5.1 Komisaris Independen

KNKG (2006) mendefinisikan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan menurut FCGI (2002), Dewan Komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari *corporate governance* yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2011), tugas pokok dewan komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan direksi serta memberikan rekomendasi kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Namun dalam prakteknya dewan komisaris di dalam perusahaan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga diperlukan suatu dewan komisaris yang bersifat independen.

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas papan dan dengan demikian

meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan (Bonn, 2004; Shah dkk, 2008; O'Neal dan Thomas, 1995 dalam Kathyayini *et al*, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan keobjektifan dan mampu meningkatkan kesetaraan (*fairness*) dalam memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan sekaligus mendorong diterapkannya *good corporate governance*.

Adanya keberadaan Komisaris Independen telah diatur sejak 1 Juli 2000 oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai jumlah minimal Komisaris Independen, yaitu 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun kriteria lainnya tentang Komisaris Independen di dalam peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, antara lain:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendalian (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan / atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

2.1.5.2 Institutional Ownership

Konsentrasi kepemilikan saham dalam perusahaan merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009 dalam Kathyayini *et al*, 2012). Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang substansial sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham tersebut dapat mengawasi kinerja perusahaan dan perilaku manajemen dalam rangka melindungi kepentingan investasi di dalam perusahaan.

Pada penelitian ini digunakan variabel independen kepemilikan institusional. Definisi dari kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak- pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berebentuk Perseroan (PT), dan

institusi lainnya. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman, 2007).

2.1.5.3 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal di dalam perusahaan memiliki peranan yang penting terhadap aktivitas pengawasan manajemen di dalam perusahaan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun

usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih, dan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 3, 4, dan 5 dijelaskan bahwa perseroan yang kegiatannya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

2.1.5.4 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Kemajemukan dalam dewan komisaris menjadi hal yang umum terjadi dalam suatu dewan komisaris. Kemajemukan ini dianggap sebagian besar peneliti dapat mempengaruhi keputusan dewan komisaris untuk memutuskan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Adams dan Ferreira (dalam Kathyayini, *et al* 2012), tingkat keragaman pada dewan komisaris mempengaruhi keputusan mereka dan kegiatan perusahaan. Branco dan Rodrigues (dalam Handayani 2011) menyatakan bahwa tema keragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori *stakeholder*. Carter, *et al.* (dalam Handayani, 2011) mendukung adanya keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat menimbulkan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris yang memiliki latar

belakang yang lebih tradisional. Keragaman dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu proporsi wanita dalam dewan komisaris.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan umum mengenai literatur-literatur yang membahas ataupun meneliti tentang karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan sosial dan lingkungan telah banyak dilakukan dapat dijadikan dasar yang relevan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya. Sembiring (2003) meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *profile*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada 78 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sembiring (2003) mengacu penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) dan Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahunan, untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 10.00. Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *profile*, dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, profitabilitas dan *leverage* gagal untuk menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan Novita dan Djakman (2008) adalah menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada 107 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Novita dan Djakman (2008) menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai *Corporate*

Social Disclosure Index (CSDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Handajani, *et al.* (2009) menguji pengaruh antara earnings management dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 67 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Handajani, *et al.* (2009) menggunakan indikator Global Reporting Initiative (GRI) sebagai *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *earnings management*, komite audit, profile perusahaan dan tipe industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan komposisi dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

De Villers (2009) menguji pengaruh antara karakteristik *corporate governance* yang diproksikan dengan *Board Size*, *Institutional investors*, *Proportion of independent directors*, *CEO duality* terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel top 100 perusahaan di USA. Hasil penelitian de Villers (2009) menunjukkan bahwa *Board Size* dan *Proportion of independent directors* mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Sedangkan variabel independen yang lain, yaitu *Institutional investors* dan *CEO duality* menunjukkan hubungan yang negatif terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

Penelitian Kathyayini, *et al.* (2012) yang merupakan acuan dari penelitian ini menguji karakteristik *corporate governance* menggunakan variabel independen berupa proporsi komisaris independen, *institutional ownership*, ukuran dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan oleh perusahaan sebagai variabel dependen. Pada penelitian tersebut proporsi komisaris independen dan proporsi wanita dalam dewan komisaris memiliki hasil yang signifikan dan sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat dan menunjukkan hubungan yang positif terhadap pengungkapan lingkungan oleh perusahaan. Hasil dari variabel independen *institutional ownership* dan ukuran dewan komisaris bertentangan dengan hipotesis yang dibuatnya tentang hubungan negatif *institutional ownership* dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan, melainkan memiliki hasil yang positif.

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang Digunakan	HASIL PENELITIAN
1.	Sembiring (2003)	Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas	Ukuran Perusahaan, <i>profile</i> , dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas dan <i>lverage</i> gagal untuk menunjukkan pengaruh signifikansinya.

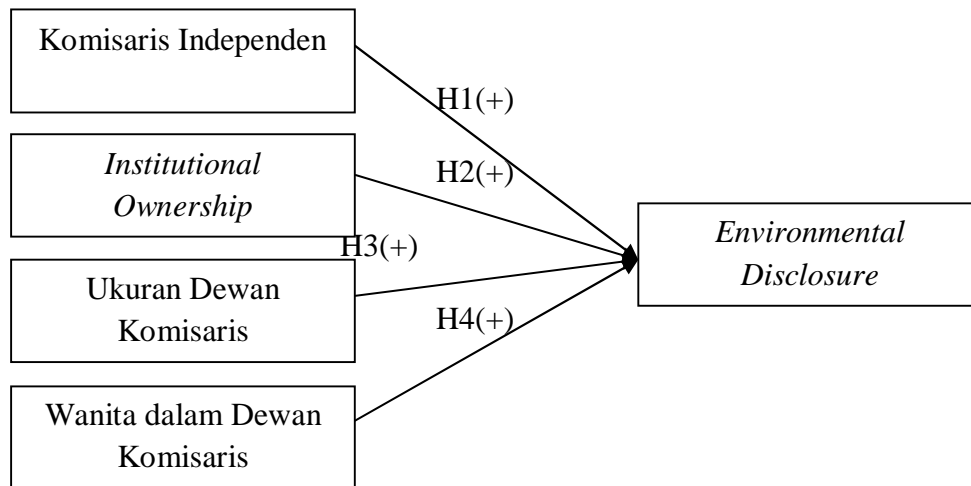
2.	Novita dan Djakman (2008)	Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional	Kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3.	Handajani, et al. (2009)	Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>firm size</i>	Komite Audit dan <i>firm size</i> mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Komposisi dewan komisaris dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
4	De Villers (2009)	<i>Board Size</i> , <i>Institutional investors</i> , <i>Proportion of independent directors</i> , CEO <i>duality</i>	<i>Board Size</i> berpengaruh positif terhadap performa lingkungan, <i>institutional investors</i> berpengaruh negatif terhadap performa lingkungan, <i>Proportion of independent directors</i> berpengaruh positif terhadap performa lingkungan, dan CEO <i>duality</i> berpengaruh negatif terhadap performa lingkungan
5	Kathyayini, et al. (2012)	Proporsi Komisaris Independen, <i>Institutional Ownership</i> , Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi wanita dalam dewan	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, <i>institutional ownership</i> tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran dewan komisaris tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, proporsi wanita dalam dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh antara Komisaris Independen, *Institutional Ownership*, Ukuran Dewan

Komisaris, dan Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris. Kerangka pemikiran tersebut disajikan pada **Gambar 2.2** sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Komisaris Independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Oleh sebab itu, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Donnelly dan Mulcahy (dalam Kathyayini, *et al* 2012) komisaris independen memiliki kekuatan untuk meningkatkan transparansi dewan komisaris sehingga perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi tambahan. Oleh karena itu, komisaris independen memiliki kapasitas untuk memaksa pengelola untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahaya *etal.*, 2009 dalam Kathyayini *et al.*, 2012).

Adanya komposisi komisaris independen yang semakin besar di dalam dewan komisaris maka pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi tersebut dapat meningkatkan transparansi perusahaan, yang salah satu bentuk transparansi tersebut adalah laporan mengenai pengungkapan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan kepada para *stakeholder*. Menurut De Villiers dkk. (2009), struktur dewan yang mempunyai lebih banyak komisaris independen memaksa manajer perusahaan untuk mengambil keputusan yang mendukung kegiatan lingkungan, dan De Villiers dkk. (2009) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki dewan komisaris yang lebih banyak. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja Dewan Komisaris mampu bertindak semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan, sehingga mendorong peningkatan *Corporate Environmental Disclosure* (CED) sebagai salah satu proksi dari kegiatan yang mendukung kepentingan

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.2 Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Lakhal (dalam Kathyayini, *et al* 2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kolektor besar tabungan dan pemasok dana ke pasar keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dan perusahaan investasi dan lain-lain.

Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi yang lebih besar dapat melakukan monitoring dengan lebih ketat, sehingga dapat mendorong manajemen untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan lebih transparan, termasuk dalam hal pengungkapan sebagai bentuk informasi dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Arif (2006) mengemukakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memonitor manajemen. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (dalam Barnae dan Rubin 2005) bahwa dengan kepemilikan saham oleh institusi yang semakin besar, maka memiliki insentif untuk memantau pengambilan

keputusan perusahaan. Permasari (dalam Handayani 2011) berpendapat bahwa investor institusi memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Kepemilikan institusi yang besar di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan perusahaan kepada manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan tersebut meminimalkan kesalahan yang dilakukan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan. Nurkhin (dalam Handayani 2011) berpendapat aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya. Sehingga makin besar kepemilikan institusi dalam perusahaan akan meningkatkan pula kinerja ataupun pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari tindakan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi informasi untuk *stakeholder*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Institutional ownership berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal di dalam perusahaan memiliki peranan yang penting terhadap aktivitas pengawasan. Semakin besar ukuran dewan komisaris di dalam perusahaan maka pengawasan yang

dilakukan dewan komisaris akan menjadi lebih ketat. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006).

Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menutup kelemahan asimetri informasi karena dengan memiliki banyak anggota dewan komisaris maka semakin banyak pula ide, pengalaman, dan adanya interaksi antar dewan komisaris yang mendukung proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut berfungsi agar di dalam melakukan kegiatan bisnis nya perusahaan tetap transparan sehingga mendapat respon yang positif dari para *stakeholder* nya. Dalton *et al* (1999) dan Bonn (2004) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif karena dapat membawa lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dan memberikan saran yang lebih baik. Sependapat dengan hal tersebut, Sembiring (2003) dan Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif sehingga proses pengungkapan laporan mengenai kegiatan lingkungan dapat lebih optimal.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi di dalam dewan komisaris akan bertambah, baik dalam hal pengalaman maupun pengetahuan sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas.

Selain itu, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan yang dalam penelitian ini menggunakan variabel pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.4 Pengaruh Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Keragaman *gender* di dalam dewan komisaris merupakan hal yang sering terjadi di dalam komposisi suatu dewan komisaris. Tidak dapat dipungkiri dengan perbedaan tersebut muncul pula keanekaragaman cara berfikir dari perbedaan *gender* tersebut, sehingga dapat mempengaruhi dewan komisaris dalam mengambil suatu keputusan. Adams dan Ferreira (dalam Kathyayini, *et al* 2012) mengemukakan bahwa tingkat keragaman dalam dewan komisaris mempengaruhi dewan komisaris dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan. Beberapa studi menemukan bahwa tingkat keragaman dalam dewan komisaris memiliki efek yang positif pada kinerja perusahaan di Australia (Bonn dalam Kathyayini, *et al* 2012).

Beberapa studi menemukan bahwa keberadaan wanita di dalam dewan komisaris menimbulkan efek yang positif dalam hal kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Ibrahim dan

Angelidis (1994) menemukan bahwa dewan komisaris wanita menampilkan tanggung jawab yang besar, dalam analisis yang dilakukan mereka ditemukan bahwa perempuan lebih *philanthropy* dan kurang peduli terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Huse dan Solberg (dalam Kathyayini, *et al* 2012) menyatakan bahwa wanita lebih berkomitmen, lebih siap, lebih rajin dan ikut terlibat dalam pengajuan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di ruang rapat. Demikian halnya dengan Adams dan Ferreira (dalam Kathyayini, *et al* 2012) yang berpendapat bahwa lebih banyak perempuan di dewan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan bahwa wanita memiliki kehadiran atau partisipasi yang lebih baik.

Memiliki lebih banyak dewan komisaris wanita juga dapat memiliki efek positif dalam hal pengungkapan baik keuangan dan non keuangan (Kathyayini *et al* 2012). Adams dan Ferreira (dalam Kathyayini, *et al* 2012) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang besar cenderung membuat rapat dewan lebih kondusif dan menyebabkan pola kehadiran yang baik pada pertemuan dewan komisaris, sehingga dewan komisaris yang berbeda lebih baik dibandingkan dewan komisaris yang homogen.

Memiliki dewan komisaris wanita di dalam perusahaan dapat meningkatkan pula independensi dewan komisaris. Proses monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat meningkat dengan independensi dewan sehingga dapat menampilkan laporan yang transparan. Kang *et al.* (2007) mengemukakan bahwa adanya wanita di dalam komisaris akan meningkatkan independensi dewan komisaris.

Independen merupakan salah satu faktor penting terciptanya akuntabilitas perusahaan dan dengan demikian memiliki potensi untuk meningkatkan pengungkapan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
DEPENDEN	<i>Corporate Environmental Disclosure</i>	Persentase pengungkapan lingkungan perusahaan	Skala Ratio
INDEPENDEN	Proporsi Komisaris Independen	Persentase Komisaris Independen	Skala Ratio
	Institutional Ownership	Persentase dari investor institutional	Skala Ratio
	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah komisaris dalam dewan	Skala Interval
	Proporsi wanita dalam Dewan Komisaris	Presentase wanita dalam dewan direksi	Skala Ratio
KONTROL	Profitabilitas	ROA	Skala Ratio
	Firm size	<i>Operating Revenue</i>	Skala Interval
		<i>Market Capitalization</i>	Skala Interval

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lain seperti variabel independen atau variabel kontrol. Variabel terikat pada penelitian ini adalah *Corporate Environmental Disclosure* (CED). Pengukuran *environmental disclosure* dapat dilihat pada pengungkapan CSR di laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah.

Penilaian CSR menggunakan pedoman indeks GRI (*Global Reporting Initiative*) yang berlaku secara internasional yang telah digunakan di banyak negara dan salah satunya Indonesia. Jumlah item pengungkapan CSR secara keseluruhan menurut GRI adalah 79 item yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item).

Pengukuran *corporate environmental disclosure* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CED} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan GRI}}$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Proporsi Komisaris Independen, *Institutional Ownership*, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi wanita dalam Dewan Komisaris.

3.1.2.1 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Proporsi Komisaris Independen diukur dengan persentase (%) jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan total anggota Dewan Komisaris di perusahaan.

3.1.2.2 Institutional Ownership

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh saham yang beredar.

3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris menggunakan skala interval.

3.1.2.4 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Proporsi wanita dalam dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris wanita dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Skala yang digunakan untuk proporsi wanita dalam dewan komisaris adalah rasio. Proporsi ini dihitung berdasarkan jumlah wanita dalam dewan komisaris dibagi dengan total anggota dewan komisaris (Kathyayini *et al* 2012).

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya menjadi lebih baik sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *corporate social disclosure*.

3.1.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Asset* (ROA) sebagai mana telah dilakukan dalam penelitian Setyawan (2011) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Aset}} \quad 48$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

3.1.3.2 Firm Size

Telah banyak penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan terkait dengan pengungkapan perusahaan (Kathyayini *et al* 2012). Ukuran perusahaan ini dapat diukur dengan *market capitalization* dan *sales*.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.
Sampel tersebut dipilih dikarenakan aktivitas perusahaan pertambangan seringkali bersinggungan dengan lingkungan, baik manusia maupun alam.
2. Tidak keluar (*delisting*) dari BEI selama periode penelitian 2009-2011
3. Mengungkapkan informasi dalam *annual report* yang terkait dengan variabel yang digunakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *annual report* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Data sekunder lainnya dapat diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, website dan referensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011, variabel terkait penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2007).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai

tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF) digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (*DW test*). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah dl dan batas atas du . H_0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Analisis regresi berganda adalah alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda ini dipakai karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) dengan *software* SPSS. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$\text{CEDit} = \alpha_0 + \beta_1\text{INKOMit} + \beta_2\text{INSOWit} + \beta_3\text{UDKOMit} + \beta_4\text{PROPFEMit} + \beta_5\text{ROAit} + \beta_6\text{MKT_CAPit} + \beta_7\text{OP_REVit} + e$$

Keterangan:

CEDit	= <i>Corporate environmental disclosure</i>
α_0	= Konstanta
β_1 - β_8	= Koefisien
INKOMit	= Proporsi Dewan Komisaris Independen
INSOWit	= <i>Institutional Ownership</i>
UDKOMit	= Ukuran Dewan Komisaris
PROPFEMit	= Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris
ROAit	= Profitabilitas diproksi dengan Return On Assets
MKT_CAPit	= <i>Market Capitalisation</i> (\$)
OP_REVit	= <i>Sales</i> (\$)
e	= Error

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Dari sini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

3.5.3.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* $0.05(\alpha= 5\%)$. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. bila nilai signifikansi $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. bila nilai signifikansi $t > 0.05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen.